

BAB III

KEPENTINGAN EKONOMI DAN KEAMANAN SUDAN

Bab ini menjelaskan kepentingan Sudan dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama periode 2020-2023, menggunakan konsep kepentingan nasional dari Donald Nuechterlein. Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional melibatkan kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan ekonomi dan keamanan negara. Pada bagian pertama, penulis membahas penghapusan embargo ekonomi terhadap Sudan, memungkinkan negara tersebut untuk bebas bekerja sama dengan negara lain dan meminta bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional. Bagian kedua menjelaskan bagaimana inovasi dan ketahanan pangan Israel dapat membantu sektor pertanian Sudan melalui teknologi pertanian yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Bagian ketiga membahas penghapusan Sudan dari daftar negara teroris yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.

3.1 Kepentingan Ekonomi Sudan

3.1.1 Penghapusan Embargo Ekonomi Sudan

Setelah adanya perang Darfur serta terpisahnya dua wilayah menjadi Sudan dan Sudan Selatan, Presiden Omar Al-Bashir masih memegang kekuasaan tertinggi sampai pada tahun 2019. Dengan adanya hal tersebut membuat masyarakat Sudan melakukan aksi demonstrasi yang ditujukan untuk melakukan penggulingan Presiden Omar Al-Bashir yang dimulai pada tahun 2016 hingga puncaknya pada tahun 2019. Yang pada akhirnya Omar Al-Bashir berhasil digulingkan oleh pihak militer selama masa pemerintahan tersebut Presiden tersebut sering dihadapkan

pada isu tuduhan korupsi dan pembunuhan dan dengan adanya hal tersebut mengakhiri masa kekuasaan terlama Presiden tersebut selama 30 tahun.⁸⁸

Omar Al-Bashir menjalankan pemerintahannya di Sudan dengan basis pandangan politik yang cenderung ke arah Islamisme. Artinya, keputusan dan kebijakan di negara tersebut banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, dan kemungkinan besar tidak banyak dipengaruhi oleh negara lain. Ini kemudian memberi dampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Sudan serta kebijakan internasional yang diambil oleh negara tersebut. Oleh karena pemerintahan Sudan yang berdasar pada arah islamisme kemudian menjadikan pemerintah Amerika Serikat tahun 1993 mengecap Sudan sebagai negara yang mendukung Gerakan terorisme (*State-sponsored terrorism* / Al-Daulah Al-Ra'iyah li Al-Irhab). Dasar alasan AS melabeli Sudan sebagai negara pendukung terorisme sebab Sudan menjalin hubungan dengan kelompok eksterisme yang sebelumnya juga telah dilabeli oleh AS seperti Al-Qaeda, Hizbullah dan Hamas.⁸⁹

Setelah Amerika Serikat mengumumkan Sudan sebagai negara pendukung terorisme, pada tanggal 3 November 1997, Amerika Serikat secara resmi menerapkan embargo terhadap Sudan. Dampak dari embargo ini, perekonomian Sudan terhenti karena pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dengan kata lain Sudan tidak dapat mendapat bantuan Internasional berupa bantuan kemanusiaan apabila Sudan memerlukan hal tersebut, efek buruknya juga berkaitan dengan hal pihak yang ingin melakukan Kerjasama dengan Amerika Serikat harus

⁸⁸ BBC, *Omar Bashir: ICC Delegation Begins Talks in Sudan over Former Leader*, BBC, 2020.

⁸⁹ US Department of State, *Country Reports on Terrorism 2019: Sudan*, state.gov, 2019.

memastikan terlebih dahulu produknya tidak memiliki keterkaitan dengan negara Sudan hal ini menjadikan daftar deretan buruk atau efek negatif yang didapat Sudan.⁹⁰ Selama dua puluh tahun, Sudan mengalami embargo. Bahkan pada tahun 2007, keadaan Sudan semakin memburuk karena Sudan mendapat hukuman tambahan karena diduga melanggar hak asasi manusia terhadap penduduk Sudan Selatan.

Meskipun Amerika Serikat mencabut embargo ekonomi sebagai dukungan kepada Sudan, yang menjadi sekutu Israel, Sudan masih dianggap sebagai negara pendukung terorisme. Situasi ini sangat merugikan Sudan, terutama dalam aspek ekonomi. Setelah Al Bashir mundur dari jabatannya pada tahun 2019, negara ini dipimpin oleh pemerintahan sementara yang disebut Dewan Kedaulatan. Dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh militer dan sipil.⁹¹ Abdalla Hamdok, yang sebelumnya bekerja di PBB untuk urusan ekonomi Afrika, menjadi perdana menteri dalam pemerintahan transisi Sudan. Mereka berfokus pada pemulihan ekonomi, yang memerlukan dukungan pinjaman dari lembaga-lembaga internasional. Namun, karena Sudan diklasifikasikan sebagai negara pendukung terorisme, upaya untuk mendapatkan pinjaman tersebut terkendala.⁹²

Dengan adanya hal tersebut membuat pandangan para pemimpin Sudan, salah satu cara untuk menyelamatkan perekonomian Sudan yaitu dengan mengupayakan negara tersebut untuk dapat keluar dari negara pendukung terorisme

⁹⁰ Federal Register, *Blocking Sudanese Government Property and Prohibiting Transactions With Sudan*, Presidential Documents 62, no. 214 (1997): 1–2, <https://doi.org/10.4324/9780203122273>.

⁹¹ BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS, “U.S. Relations With Sudan.”

⁹² United Nations and Development Programme, *Democratic Transition And Economic Recovery*, UNDP, 2024, <https://www.undp.org/sudan/democratic-transition-and-economic-recovery>.

atau dari daftar *state-supported terrorism*, sebuah label yang berkaitan dengan hal dibawah kontrol langsung pihak Amerika Serikat. Di bawah pengaruh Jendral Mohamed Dagalo atau dikenal dengan Hemedti, yang menjabat sebagai Wakil Dewan Kedaulatan Sudan, mengatakan untuk keluar dari daftar negara tersebut ialah dengan melakukan dengan menjalin hubungan dengan Israel hal tersebut berkaitan dengan kedekatan hubungan AS dan Israel,

Hemedti mengatakan bahwa Amerika Serikat meminta Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel hal ini ialah syarat supaya Sudan tidak lagi dianggap sebagai negara pendukung terorisme. Oleh karena itu, Dagalo mendukung langkah-langkah positif dalam berhubungan dengan Israel. Dia menyampaikan pendapat ini di televisi Sudan:

*“Sekarang, suka atau tidak suka, penghapusan Sudan dari daftar pendukung teror terkait dengan normalisasi dengan Israel. Kita butuh Israel ...Israel adalah negara maju dan seluruh dunia bekerja sama dengan Israel... Kita akan mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Kami harap semua pihak melihat kepentingan Sudan.”*⁹³

Pada Oktober 2020, Sudan mengumumkan langkahnya untuk membuka hubungan dengan Israel, menciptakan perhatian global yang besar. Pada Januari 2021, Menteri Kehakiman Sudan Nasur Aldin Abdul Bari dan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steven Mnuchin, menandatangani Abraham Accords di Khartoum. Selain itu, kedua negara juga menegaskan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) untuk menghapus utang Sudan sebesar 1 miliar Dolar AS

⁹³ Samy Magdy, *US Push for Arab-Israel Ties Divides Sudanese Leaders*, AP News, 2020, <https://apnews.com/article/election-2020-bahrain-israel-united-arab-emirates-sudan-40f83a877ed255233da20396d4ab1d7f>.

kepada Bank Dunia. Pada Desember 2020, Washington juga mengeluarkan Sudan dari daftar negara yang mendukung terorisme.⁹⁴

Pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel mencerminkan perubahan signifikan dalam lanskap politik dan ekonomi kedua negara. Faktor dominan dalam normalisasi hubungan ini adalah kepentingan ekonomi dan keamanan. Urgensi pemulihan ekonomi Sudan menjadi salah satu pendorong utama normalisasi ini. Menurut laporan Bank Dunia, ekonomi Sudan mengalami kontraksi sebesar 3,6% pada tahun 2020, mencerminkan kebutuhan mendesak akan bantuan ekonomi internasional dan investasi asing. Situasi ekonomi yang sulit ini memaksa Sudan untuk mencari cara guna memperbaiki kondisi perekonomiannya. Normalisasi hubungan dengan Israel diharapkan membuka pintu bagi investasi dan bantuan ekonomi yang sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Sudan.

Jika dilihat dari pemaparan diatas bahwasanya Sudan membutuhkan adanya penghapusan embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan hal ini menjadikan Sudan sulit mendapatkan bantuan dari pihak luar secara khususnya bantuan keuangan untuk dapat menjalankan pemerintahan yang di saat ini dipegang oleh pemerintahan transisi. Setelah penghapusan embargo ekonomi oleh Amerika Serikat Sudan mendapatkan beberapa keuntungan sepertihalnya pencabutan embargo sehingga memungkinkan negara itu untuk menerima bantuan luar negeri, termasuk bantuan kemanusiaan, pangan, sanitasi, bantuan teknis, pinjaman bersyarat, hibah, dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut Amerika Serikat

⁹⁴ Yasir Zaidan, *Op.Cit*, hal 57

berharap dapat mendorong perubahan dan juga menginginkan adanya demokratisasi yang lebih baik dengan melakukan peningkatan nilai tambah pada berbagai sektor terutama pada sektor industri dan pertanian.

Selain itu, pencabutan embargo juga memungkinkan Sudan untuk mendapatkan akses dan memperluas produksi minyak di wilayahnya yang lain yang berdekatan dengan Amerika Serikat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investor dan meningkatkan daya tarik investasi asing di sektor-sektor strategis dan menguntungkan di Sudan. Sebagian besar keuntungan dari pencabutan embargo tersebut berpengaruh pada kondisi yang masih berkaitan dengan investasi dan perekonomian, hal ini juga dapat memberikan pengaruh terhadap demokratisasi yang lebih baik. Namun, untuk mengatasi masalah lainnya, seperti inflasi, nilai tukar mata uang, dan ketergantungan ekonomi pada minyak, Sudan perlu mengembangkan sektor lainnya seperti halnya pengembangan sektor pertanian.

3.1.2 Inovator Pertanian dan Ketahanan Pangan oleh Israel

Pergeseran sikap Sudan banyak berkaitan dengan alasan ekonomi yang Sudan hadapi. Pada tahun 2019, perekonomian Sudan mengalami inflasi sebesar 170 persen, hal ini kemudian menjadikan pemerintah Sudan berupaya untuk menemukan solusi Internasional guna dapat meningkatkan perekonomian Sudan yang melemah tersebut, dikarenakan Sudan masuk kedalam negara pendukung terorisme oleh Amerika Serikat yang menjadikan hambatan dalam upayanya untuk

mendapatkan keringanan utang dari pinjaman luar negeri dari Lembaga moneter internasional, seperti Bank Dunia atau Moneter Internasional.⁹⁵

Pertanian juga sama pentingnya bagi masyarakat Sudan, pertanian memainkan peranan penting dalam perekonomian negara-negara berkembang, menyediakan sumber makanan, pendapatan dan lapangan kerja yang penting bagi masyarakat pedesaan. Menurut laporan Bank Dunia, sektor pertanian merupakan sektor yang menjanjikan dan akan memberikan penghasilan yang lebih besar dalam perekonomian Sudan di masa depan, terutama karena negara tersebut tidak memiliki ekspor berbasis sumber daya yang dominan. Sudan, sebagai produsen permen karet arab terbesar di dunia, akan terus mengandalkan sektor pertaniannya, yang menyumbang 32% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2019, untuk meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, dan mengurangi defisit transaksi berjalan. diperkirakan hal ini akan terus berlanjut.⁹⁶

Jika dilihat dari angka yang ditunjukkan, Sudan sendiri masih menghadapi masalah dalam hal produksi. Produksi pangan di Sudan menghadapi tantangan berupa infrastruktur irigasi yang tidak efisien, kekurangan air, dan degradasi lahan. Semua masalah ini memerlukan penelitian dan bidang berbasis pengetahuan yang menjadi keunggulan Israel dan yang ingin mereka ekspor. Meskipun, Pertanian tetap menjadi sektor vital dalam perekonomian Sudan, dengan hampir 80% penduduknya bergantung pada pertanian subsisten. Kerawanan pangan merupakan

⁹⁵ Zaid Haris, *Growing Close Relations Of Israel With Arab Nations : Intentions , Prospects , And Future*, Pak. Journal of Int’L Affairs 5, no. 2 (2022): 445–60, <http://pjia.com.pk/index.php/pjia/article/view/447>.

⁹⁶ World Bank, *Sudan Agriculture Value Chain Analysis*, World Bank, 2020, <https://doi.org/10.1596/34103>.

isu serius, karena kelangkaan pangan dan malnutrisi parah mengancam kemandirian ekonomi dan stabilitas sosial negara tersebut.⁹⁷

Distribusi pertanian beririgasi di Sudan tidak merata dan terutama terkonsentrasi di bagian pusat negara saja, mengakibatkan terdapat disparitas yang signifikan dalam indikator pembangunan antara berbagai daerah. Pengembangan dan irigasi lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan merupakan langkah penting. Dalam konteks Perjanjian Abraham, Israel memiliki potensi untuk memberikan bantuan dalam aspek ini.⁹⁸ Walaupun kondisi geografis Israel tidak mendukung pertanian yang subur, negara ini tetap menjadi pemimpin global dalam teknologi pertanian dan salah satu eksportir utama produk-produk segar. Pemanfaatan teknologi irigasi tetes yang luas telah berkontribusi pada peningkatan nilai produk yang ditanam oleh petani lokal sebesar 1.600 persen selama 65 tahun terakhir. Pada tahun 2018, Israel mengekspor sayuran senilai US\$350 juta, makanan olahan senilai US\$188 juta, dan benih senilai US\$151 juta.⁹⁹ Secara harfiahnya irigasi tetes ini menggunakan gravitasi untuk mengairi lahan pedesaan yang tekanan airnya tidak mencukupi untuk mengairi pertanian yang ada.¹⁰⁰

Israel dapat memprioritaskan berbagai kemajuannya dengan Sudan seperti adanya program pelatihan yang dipunyai oleh Israel yaitu MASHAV (*Israel's Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign*

⁹⁷ Yechiel M. Leiter, *Sudan: Expanding the Tent of the Abraham Accords*, Jerusalem Center for Public Affairs, 2023, <https://jcpa.org/article/sudan-expanding-the-tent-of-the-abraham-accords/>.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Jacques Neriah, *The Prospects of Normalization between Sudan and Israel*, Jerusalem Center for Public Affairs, 2023, <https://jcpa.org/the-prospects-of-normalization-between-sudan-and-israel/>.

¹⁰⁰ Ben Winslow, *Strawberries in the Desert: From Drip Irrigation to Vertical Gardens, Utah Officials Learn How Israel Does More with Less Water*, Deseret, 2023, <https://www.deseret.com/utah/2023/4/30/23703096/israel-agriculture-uses-drip-irrigation-vertical-gardens/>.

Affairs), yang pada intinya ini merupakan pelatihan yang digunakan untuk membantu para petani untuk melatih mengenai ketahanan pangan, pertanian berbiaya rendah, pengembangan usaha agribisnis yang berbasis teknologi, dan mengenai konsultasi agribisnis dan jasa teknis. Dengan adanya pelatihan yang dimiliki oleh Israel mengenai pengolahan pelatihan tersebut akan membuat para petani yang ada di Sudan akan memanfaatkan segala bentuk pelatihan tersebut untuk diaplikasikan kepada hasil olahan secara baik dan sistematis.

Hal diatas merupakan dua contoh dari teknologi yang dapat mengubah arah paradigma pangan di Sudan dan dapat juga membantu menjamin keamanan pangan bagi jutaan warga di Sudan. Israel sendiri telah mempromosikan teknologi pengalamannya ini kepada para petani yang ada di Senegal, Kenya, Afrika Selatan, Benin dan Niger melalui kementerian Luar Negerinya dan memberikan dampak yang luar biasa atas teknologi tersebut.¹⁰¹

Adapun statement yang dikeluarkan oleh Mubarak al-Fadil, ketua dari Partai Umma yang merupakan salah satu partai yang mendukung adanya pembeukaan hubungan diplomatik antara Sudan dengan Israel mengenai pentingnya teknologi pertanian bagi negara Sudan beliau mengatakan:

“Sudan sangat membutuhkan teknologi maju di bidang pertanian dan irigasi, apalagi Sudan merupakan negara agraris dengan luas lahan subur mencapai 200 juta hektar,” ujarnya. “Saat ini kami baru mengolah 45 juta hektar dengan produktivitas yang sangat rendah dan biaya yang tinggi.”¹⁰²

¹⁰¹ TECHNION UKIsrael’s university for science, *The Top 12 Ways Israel Is Feeding The World*, TECHNION UKIsrael’s university for science, 2019, <https://technionuk.org/news-post/the-top-12-ways-israel-feeds-the-world/>.

¹⁰² Michael Atit, “Sudan: Normalization With Israel Was US Condition But Will Be Beneficial,” VOA Africa, 2020, https://www.voaafrica.com/a/africa_south-sudan-focus_sudan-normalization-israel-was-us-condition-will-be-beneficial/6197616.html.

Selain daripada teknologi yang bisa di promosikan kepada Sudan, Israel sendiri dapat memberikan pemahaman mengenai benih warisan atau *Heritage Seeds*, Israel sendiri merupakan negara maju dalam budidaya ketahanan pangan benih, yang merupakan hal penting dalam menjamin ketahanan pangan. Disini jelas, bahwasanya hubungan Sudan dan Israel menekankan kepada bidang pertanian yang dapat membantu perekonomian mereka terutama bagi Sudan. Benih warisan, juga dikenal sebagai benih pusaka, ditanam dari tanaman yang telah dikultivasi di daerah tertentu selama beberapa generasi, mengembangkan ketahanan iklim yang kuat.

Benih-benih ini terbentuk melalui pembuahan murni dimana penyerbukan terbuka oleh angin, serangga, dan burung membawa serbuk sari ke tanaman dari spesies yang sama. Setelah melalui proses budidaya benih "varietas pusaka" ini, hasilnya adalah benih dengan ketahanan tinggi yang memastikan tanaman tetap stabil dan murni meskipun menghadapi kondisi pertumbuhan yang sulit seperti cuaca ekstrim, kekeringan, hama, dan penyakit lainnya. Karena isu-isu perubahan iklim dan meningkatnya ancaman terhadap ketahanan pangan, ada pergeseran umum di kalangan petani, organisasi, untuk kembali menggunakan tanaman tradisional, terutama dalam mempelajari ketahanan benih warisan. Israel berada di garis depan dalam perubahan ini, dan Sudan dengan tepat mengidentifikasi area ini sebagai komponen penting dalam membangun kembali ekonomi berbasis agro untuk menjamin pasokan pangan yang memadai bagi rakyatnya.

Dengan adanya pembukaan hubungan diplomatik sektor yang akan berpengaruh pada ekonomi dan perdagangan, teknologi pertanian menjadi fokus

kerja sama antara Sudan dan Israel. Hal yang dapat diperoleh oleh Sudan dari Israel terbukti sangat berharga bagi Sudan. Sudan dapat belajar bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian melalui berbagai perubahan kebijakan, termasuk pasar terpusat, subsidi, dan peningkatan penggunaan pupuk. Selain itu, Israel dapat menjadi target pasar baru bagi ekspor pertanian Sudan seperti sorgum, kapas, kacang tanah, wijen, millet, gandum, tebu, gum arab, dan peternakan.¹⁰³

Penanaman modal asing merupakan sumber modal yang penting untuk berinvestasi di negara berkembang. Seperti di banyak negara berkembang, tingkat pembangunan ekonomi Sudan memerlukan investasi asing yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Israel mempunyai potensi untuk meningkatkan pembiayaan proyek dan investasi modal untuk membantu membangun proyek-proyek yang sangat dibutuhkan. Sudan khususnya mempunyai peluang untuk memanfaatkan lokasinya yang strategis di Laut Merah. Hal ini dapat dicapai dengan menghubungkan empat negara tetangga yang tidak memiliki daratan, Sudan Selatan, Chad, Republik Afrika Tengah dan Ethiopia, ke Port Sudan.¹⁰⁴

Sebagai negara maju, Israel dapat mendukung sektor jasa Sudan melalui kerja sama, khususnya di sektor jasa keuangan. Misalnya, Sudan dapat mengikuti jalur yang sama seperti Uni Emirat Arab, bekerja sama dalam layanan perbankan dan

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Try Ananto Wicaksono, *Sudan After Sanctions: Why Normalization Matters for Sudan*, Harvard International Review, 2021, <https://hir.harvard.edu/sudan-after-sanctions-why-normalization-matters-for-sudan/>.

peraturan pembayaran setelah pembukaan hubungan dengan Israel.¹⁰⁵ Bagi Israel, menjalin hubungan diplomatik normal dengan Sudan telah lama menjadi tujuan strategis. Hal ini menandakan penerimaan yang lebih besar di Afrika Utara dan potensi hubungan dagang yang lebih erat bagi negara yang sejauh ini belum banyak melakukan bisnis di wilayah tersebut. Bahkan bisa mengarah pada standarisasi lebih lanjut dengan negara lain.

3.2 Kepentingan Keamanan Sudan

3.2.1 Penghapusan Sudan Dalam Daftar Negara Terorisme

Sudan merupakan salah satu negara yang berada di kawasan MENA yang bisa dikatakan tempat titik transit, tempat pertemuan, dan tempat berlindung bagi kelompok-kelompok ekstremis yang didukung oleh Iran. Setelah perang teluk, Sudan merupakan negara yang menyoroti retorika anti-Khartoum dan melontarkan kritiknya terhadap kebijakan Amerika Serikat yang mendukung Israel. Setelah terjadinya pergeseran pemerintahan Al-Bashir, penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme merupakan tujuan dari pemerintahan transisi. Setelah negosiasi yang terjadi selama berbulan-bulan, keinginan Sudan terpenuhi ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump yang mengambil kebijakan berlandaskan perubahan mendasar dalam hubungan Amerika Serikat dan Sudan dimana Amerika Serikat memiliki peluang akan memberikan dukung yang lebih kuat untuk transisi demokrasi Sudan.

¹⁰⁵ Reuters Staff, *Israel, UAE Will Cooperate on Financial Services, Investment*, Reuters, 2020, <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-usa-financial-idUSKBN25S4KC/?ref=hir.harvard.edu>.

Dikarenakan perjanjian yang dilakukan oleh Sudan dan Israel terdapat negara ketiga yaitu Amerika Serikat sebagai negara mediasi, memungkinkan untuk Sudan mementingkan kepentingan mendasar untuk dapat menyelamatkan negaranya dari jurang kemiskinan yang lebih dalam. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengusulkan pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel dalam sebuah pertemuan, meskipun pada saat itu Sudan belum membuat keputusan resmi tentang hal tersebut. Namun, usaha untuk menjalin hubungan tidak berhenti di situ. Dalam pertemuan antara Amerika Serikat dan UEA, pembahasan tentang peluang perjanjian tersebut menarik perhatian, termasuk kemungkinan penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Melihat keuntungan yang diperoleh oleh beberapa negara Arab yang telah menjalin hubungan normalisasi dengan Israel, Sudan tertarik dengan peluang tersebut.

Secara Internasional, Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki pengaruh hegemoni yang dapat mempengaruhi sebuah negara mengambil sebuah keputusan, yang dalam hal ini Amerika Serikat dapat memberikan label sebuah negara yang mendukung terorisme berdasarkan sejumlah alasan hukum serta kebijakan yang mendasari tingkah laku Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Adapun beberapa alasan utama mengenai negara Amerika Serikat memiliki wewenang dalam mengecap sebuah negara sebagai pendukung terorisme yang meliputi: Posisi Amerika Serikat sebagai negara *superpower*, adanya undang-undang terkait terorisme, dan koordinasi dengan komunitas internasional.

Jika dilihat dari posisi negara Amerika Serikat dalam konteks negara *superpower* Amerika Serikat memiliki kapabilitas untuk dapat mempengaruhi kebijakan internasional serta dapat menetapkan standar dalam banyak isu dalam perpolitikan di dunia, yang dalam hal ini termasuk terorisme. Penetapan negara sebagai sponsor terorisme juga merupakan bagian dari strategi luar negeri Amerika Serikat untuk menekan negara-negara yang di anggap dapat mengancam stabilitas global dan keamanan nasional.¹⁰⁶

Kemudian terdapat pula undang-undang Amerika Serikat yang mengatakan terkait terorisme pada *One Hundred Fifteenth Congress of the United States of America* pada *Section 1754 (C) Countries Supporting International Terrorism* Pada ayat i dan ii yang mengatakan:

“... (i) The government of such country has repeatedly provided support for acts of international terrorism. (ii) The export, reexport, or in-country transfer of such items could make a significant contribution to the military potential of such country, including its military logistics capability, or could enhance the ability of such country to support acts of international terrorism.”¹⁰⁷

Amerika Serikat memiliki peranan aktif dalam komunitas Internasional dalam memerangi sebuah negara terorisme. Hal ini berkaitan dengan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai informasi dan menjalankan operasi anti-terorisme. Dengan adanya hubungan yang dimiliki oleh Amerika Serikat kepada negara lain hal ini menjadikan negara Amerika Serikat memiliki tanggung jawab

¹⁰⁶ Taylor McNeil, “Why the United States Is the Only Superpower,” Tufts Now, 2019, <https://now.tufts.edu/2019/11/21/why-united-states-only-superpower>.

¹⁰⁷ USCongress, “One Hundred Fifteenth Congress of the United States of America,” 2018, <http://www.copyright.gov/legislation/s505.pdf>.

lebih untuk melindungi setiap mitra kerjasamanya untuk dapat terhindar dari ancaman terorisme tersebut.¹⁰⁸

Amerika Serikat memiliki kriteria khusus dalam menetapkan suatu negara sebagai pendukung terorisme, yang berdampak signifikan pada hubungan diplomatik dan ekonomi. Menurut Departemen Luar Negeri AS, sebuah negara dapat ditetapkan sebagai pendukung terorisme jika pemerintah negara tersebut berulang kali memberikan dukungan terhadap tindakan terorisme internasional. Kriteria ini meliputi berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan finansial, logistik, pelatihan, atau perlindungan kepada kelompok-kelompok teroris. Proses penetapan ini melibatkan pengumpulan dan analisis bukti yang menunjukkan keterlibatan atau dukungan pemerintah negara yang bersangkutan terhadap aktivitas terorisme.¹⁰⁹

Dalam kasus Sudan, penetapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Sudan telah memberikan dukungan kepada berbagai kelompok militan, termasuk Al-Qaeda dan Hamas. Tuduhan tersebut mencakup pemberian perlindungan, pelatihan, dan dukungan logistik kepada para militan yang beroperasi di wilayahnya. Akibat dari penetapan ini, Sudan menghadapi berbagai sanksi ekonomi dan pembatasan diplomatik yang memberatkan hubungan internasionalnya.¹¹⁰

Proses penetapan ini melibatkan evaluasi komprehensif oleh berbagai lembaga pemerintah AS, termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen

¹⁰⁸ *Ibid*, *Homeland Security*

¹⁰⁹ U.S. Department of State. (2021). State Sponsors of Terrorism. <https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/>

¹¹⁰ U.S. Department of State. (2022). U.S. Relations With Sudan. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-sudan/>.

Keuangan, dan badan intelijen. Kriteria yang digunakan mencakup penyediaan tempat perlindungan yang aman, dukungan finansial, pelatihan, atau bantuan logistik kepada kelompok teroris.¹¹¹ Dalam konteks Sudan, keputusan AS untuk mencabut status negara pendukung terorisme pada tahun 2020 mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan Sudan dan upayanya untuk memperbaiki hubungan internasional.¹¹²

Penetapan ini membawa konsekuensi serius, termasuk sanksi ekonomi, pembatasan bantuan luar negeri, dan larangan ekspor dan penjualan barang-barang tertentu. Namun, proses pencabutan status ini juga rumit dan memerlukan persetujuan Kongres AS serta bukti perubahan kebijakan yang substansial dari negara yang bersangkutan.¹¹³ Kasus Sudan menunjukkan bahwa standar AS dalam menetapkan dan mencabut status negara pendukung terorisme tidak hanya didasarkan pada faktor keamanan, tetapi juga pertimbangan geopolitik dan ekonomi yang lebih luas.

Daftar Negara Sponsor Terorisme atau *List of State Sponsors of Terrorism* merupakan sebuah istilah atau dengan kata lain merupakan list yang diberikan oleh negara Amerika Serikat untuk melabeli negara yang mendukung gerakan-gerakan separatisme atau berkaitan dengan kejahatan internasional. Sejumlah negara termasuk dalam daftar negara yang didukung oleh Amerika Serikat, antara lain

¹¹¹ Byman, D> L. (2008). The Changing Nature of State Sponsorship of Terrorism. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/the-changing-nature-of-state-sponsorship-of-terrorism/>.

¹¹² Mohiedeen, N. (2020). Sudan Welcomes US Decision to Remove Khartoum from Sponsors of Terrorism List. https://www.voanews.com/a/africa_sudan-welcomes-us-decision-remove-khartoum-sponsors-terrorism-list/6199599.html

¹¹³ U.S. Department of State. (2021). State Sponsors of Terrorism. <https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/>

Yaman Selatan, Kuba, Libya, Iran, Irak, Korea Utara, Suriah, dan Sudan.¹¹⁴ Pada 12 Agustus 1993, Sudan dimasukkan dalam daftar karena AS mencurigai Sudan memiliki hubungan dengan anggota Organisasi Abu Nidal, Hizbullah dan Hamas. Dan adanya faktor kedekatan Sudan dengan Irak dan Iran dalam memberikan perlindungan serta bantuan kepada kelompok militan terorisme Islam.

Negara-negara yang masuk dalam daftar Amerika Serikat mengalami kerugian yang signifikan. Adapun efek buruk yang didapatkan negara yang masuk sebagai negara pendukung terorisme yang dicap oleh Amerika Serikat memberlakukan beberapa tindakan terhadap Sudan, seperti melarang ekspor dan penjualan senjata, melarang menerima bantuan ekonomi, memberlakukan pembatasan pada bantuan keuangan dari lembaga seperti Bank Dunia, serta melarang warga Sudan masuk ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, menjadi salah satu negara yang termasuk dalam daftar tersebut tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena Amerika memiliki kekuatan besar, dan jika Amerika menolak, akan sulit bagi negara tersebut diterima oleh negara lain. Selain itu, akan sulit bagi negara tersebut menerima bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat.

Dengan dimasukkannya Sudan sebagai negara pendukung terorisme merupakan hal buruk bagi negara yang mengalami krisis ekonomi yang sudah berlangsung lama. Investasi asing ke dalam negeri dan perdagangan dengan negara lain sebagian dibatasi. Penghapusan negara tersebut dari SSTL dianggap sebagai

¹¹⁴ US Department of State, *State Sponsors of Terrorism*, state.gov, n.d., <https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/>.

langkah penting untuk membuka jalan bagi integrasi negara tersebut ke dalam perekonomian global, setelah terisolasi selama hampir tiga dekade.

Dasar penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme secara jelas tertulis di dalam 31 C.F.R part 596 yang menjelaskan bahwasanya “*Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC)* dan diubah menjadi *Terorisme List Government Sanctions Regulations* dan untuk menerapkan perubahan yang dihasilkan tersebut melalui Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 14 Desember 2020 mengenai pembatalan penunjukkan Sudan sebagai negara sponsor terorisme, hal ini juga disambut baik oleh Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok.¹¹⁵

Suatu kesempatan yang sangat besar mengenai penghapusan nama suatu negara dari daftar negara pendukung terorisme oleh Amerika Serikat merupakan hal yang sangat penting bagi negara yang terdampak. Dengan adanya penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme sebagai kepentingan nasional yang dibawa oleh Sudan, hal ini diumumkan langsung oleh Trump melalui akun Twitter-nya.

“ Akhirnya, Keadilan untuk rakyat Amerika dan Langkah besar untuk Sudan, setelah disetorkan, saya akan mencabut Sudan dari Negara Sponsor Terorisme.

(Sumber: Twitter Donald Trump)¹¹⁶

Sedangkan respon yang diberikan oleh Sudan sendiri terkait dengan penghapusan ini merupakan langkah awal yang positif demi perpolitikan yang ada

¹¹⁵ office Of Terrorism And Financial Intelligence, *Sudan and Darfur Sanctions*, OFAC, 2020, <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions>.

¹¹⁶ Donald Trump, *JUSTICE for the American People and BIG Step for Sudan!*, Twitter, 2020, <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1318251010595303424>.

di Sudan. Adapun statement yang di lontarkan langsung oleh Abdalla Hamdok dan Presiden Transisi Sudan Abdel Fattah al-Burhan melalui laman twitternya masing-masing, terkait setelah penghapusan Sudan dari negara pendukung terorisme:

“Thanks to President Donald Trump for signing today the executive order to remove Sudan from #SSTL. We're working closely with the US Administration & Congress to conclude the SSTL removal process in a timely manner. We work towards int'l relations that best serve our people.”

(Sumber: Twitter Abdalla Hamdok)¹¹⁷

“Greetings and congratulations to the Sudanese people on the occasion of Sudan's exit from the list of countries sponsoring terrorism. This great work is the result of an effort made by my countrymen, and it was done in the same complementary spirit of the masses of the popular and official December Revolution. Thanks to the ministerial and diplomatic working groups. Thank before and after to God, Lord of the Worlds”.

Sumber: Twitter Abdurahman Fatah Al-Burhan (Presiden Dewan Kedaulatan Transisi Sudan)¹¹⁸

Penetapan ini membawa konsekuensi serius, termasuk sanksi ekonomi, pembatasan bantuan luar negeri, dan larangan ekspor dan penjualan barang-barang tertentu. Namun, proses pencabutan status ini juga rumit dan memerlukan persetujuan Kongres AS serta bukti perubahan kebijakan yang substansial dari negara yang bersangkutan.¹¹⁹ Kasus Sudan menunjukkan bahwa standar AS dalam menetapkan dan mencabut status negara pendukung terorisme tidak hanya

¹¹⁷ <https://x.com/SudanPMHamdok/status/1319660341303955457?>

¹¹⁸ Abdel Fattah Al-Burhan, *Sudans Exit From Sponsoring Terrorism*, Twitter, 2020, <https://twitter.com/aftaburhan?lang=en>.

¹¹⁹ U.S. Department of State. (2021). State Sponsors of Terrorism. <https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/>

didasarkan pada faktor keamanan, tetapi juga pertimbangan geopolitik dan ekonomi yang lebih luas.

Namun, sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Sudan harus membayar kompensasi sebesar 355 juta dolar Amerika Serikat kepada korban dan keluarga yang terkena dampak dari aksi terorisme yang terjadi di Tanzania dan Kenya.¹²⁰

Pembayaran ini merupakan syarat untuk mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat terkait penghapusan nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme.¹²¹

Namun, jika kita melihat manfaat yang mungkin diperoleh oleh Sudan, tampaknya jauh lebih besar daripada biaya yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, langkah awal Sudan dalam mengambil tindakan tersebut bisa dikatakan sangat penting.¹²²

Dengan adanya penghapusan Sudan dari daftar negara tersebut menjadikan peluang bagi Sudan untuk dapat menerima pinjaman internasional. Pada oktober 2020, Menteri keuangan Sudan Heba Mohammed Ali mengonfirmasi bahwa negaranya akan menerima bantuan keuangan dari Amerika Serikat.¹²³ IMF juga telah menandatangani program reformasi ekonomi Sudan, hal ini berkaitan dengan negara tersebut memungkinkan mendapatkan keringanan hutang dan melanjutkan pembangunan kembali perekonomiannya yang terpuruk. Secara jelas disini Sudan

¹²⁰ Jason Burke and Oliver Holmes, "US Removes Sudan from Terrorism Blacklist in Return for \$335m," *The Guardian*, 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/19/us-removes-sudan-from-terrorism-blacklist-in-return-for-335m>.

¹²¹ ALJAZEERA, *Sudan Pays \$355m to US as Compensation to Victims of Attacks*, ALJAZEERA, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/1/sudan-pays-355-mn-to-us-in-deal-including-terror-list-removal>.

¹²² Secretary Antony Blinken, *Starting a New Chapter in Our Bilateral Relationship*, Twitter, 2021, <https://twitter.com/SecBlinken/status/1377253513655357440>

¹²³ mawahib Abdallatif, *US, Sudan Sign Economic Aid Agreement*, *The East African*, 2021, <https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-of-africa/us-sudan-sign-economic-aid-agreement-3250698>.

menginginkan penghapusan dari negara pendukung terorisme yang menjadi alasan mutlak Sudan melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.¹²⁴

Tidak hanya mencabut Sudan dari list negara yang mendukung *terorisme* Amerika Serikat juga, mengumumkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Sudan sebesar USD 81 juta serta USD 60 juta menyusul di beberapa hari setelahnya, sehingga total bantuan kemanusiaan Amerika Serikat pada tahun 2020 untuk Sudan lebih dari USD 496 juta.¹²⁵ Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Munchin mengatakan bahwa Kementerian Keuangan Amerika Serikat bersama anggota Kongres dan pemerintah Sudan akan membantu Sudan terhadap tunggakan pada institusi keuangan Internasional dan akan membantu meringankan hutang Sudan di tahun 2021. Kesepakatan tersebut terwujud pada Januari 2021 saat Menteri Keuangan Munchin bersama dengan Menteri Kehakiman Sudan Nasredeen Abdulbari melakukan penandatanganan MoU di mana Amerika Serikat akan memfasilitasi pembayaran utangnya ke World Bank.¹²⁶ Untuk pertama kalinya dalam sejarah pihak Amerika Serikat memberikan pembiayaan senilai USD 2\$ miliar kepada World Bank atas nama Sudan.

Faktor keamanan juga menjadi prioritas bagi kedua negara dalam menjalin hubungan diplomatik. Sudan menghadapi tantangan keamanan yang signifikan, termasuk konflik berkepanjangan di Darfur dan ketegangan dengan negara-negara

¹²⁴ International Monetary Fund, *Sudan to Receive Debt Relief Under the HIPC Initiative*, International Monetary Fund, 2021, <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/29/pr21199-sudan-to-receive-debt-relief-under-the-hipc-initiative.vv>

¹²⁵ Jacob Kurtzer and Judd Devermont, *Humanitarian Impacts of Sudan's Removal from the State Sponsors of Terrorism List*, CSIS, 2020, <https://www.csis.org/analysis/humanitarian-impacts-sudans-removal-state-sponsors-terrorism-list>.

¹²⁶ u.S. Department Of The Treasury, *Statement from Secretary Steven T. Mnuchin on Sudan*, Treasury, 2020, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1209>.

tetangga. *International Crisis Group* melaporkan bahwa situasi keamanan di Sudan sangat rentan dan membutuhkan penanganan yang serius. Dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Sudan berharap dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan ini. Kerja sama keamanan dengan Israel, yang memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam menangani berbagai ancaman keamanan, diharapkan dapat membantu Sudan meningkatkan stabilitas dalam negerinya.¹²⁷

Pragmatisme politik juga memainkan peran penting dalam normalisasi ini. *Brookings Institution* mencatat bahwa normalisasi hubungan Arab-Israel mencerminkan pergeseran prioritas di Timur Tengah, dengan fokus yang lebih besar pada kepentingan ekonomi dan keamanan bersama.¹²⁸ Negara-negara di kawasan tersebut semakin menyadari bahwa kolaborasi dan hubungan baik dengan Israel dapat membawa keuntungan yang signifikan, terutama dalam bidang teknologi, perdagangan, dan keamanan. Pengaruh geopolitik Amerika Serikat tidak dapat diabaikan dalam proses ini. *Council on Foreign Relations* menyoroti bahwa Amerika Serikat menggunakan berbagai insentif ekonomi dan diplomatik untuk mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.¹²⁹ Amerika Serikat melihat normalisasi ini sebagai cara untuk memperkuat aliansi

¹²⁷ International Crisis Group. (2021). Sudan: Stopping a Spiral into Civil War. <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/sudan-stopping-spiral-civil-war>.

¹²⁸ Brookings Institution. (2020). The Abraham Accords: The strategic aspect. <https://www.brookings.edu/articles/the-abraham-accords-the-strategic-aspect/>

¹²⁹ Council on Foreign Relations. (2021). U.S. Relations With Sudan. <https://www.cfr.org/backgrounder/us-sudan-relations>

regional melawan ancaman bersama, seperti Iran, serta untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut.

Dengan mengeluarkan Sudan dari daftar negara yang mendukung gerakan terorisme. Pihak Amerika Serikat juga akan mencabut hal yang berkaitan dengan pembatasan yang ada selama Sudan masih menjadi negara pendukung terorisme dan Amerika Serikat juga akan mengajak Sudan kedalam kerjasama ekonomi berkelanjutan dengan Sudan. Selain membuka kerja sama ekonomi, Amerika Serikat juga akan memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada Sudan hal ini berlandaskan dengan adanya hubungan normalisasi Sudan dengan Israel. Dengan memperluas hubungan antara Sudan dan Israel, Israel akan meningkatkan perdagangan senjata antara kedua negara. Selain itu, Amerika Serikat, Israel, dan bahkan UEA berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada Sudan setelah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun perekonomian Sudan masih dalam kondisi sulit, langkah-langkah ini dianggap positif dan diharapkan dapat membantu memperbaiki situasi ekonomi di Sudan.

Pasca penghapusan Sudan dari daftar negara teroris *List Of State Sponsors Of Terrorism* (SSTL), hubungan dengan Israel membuka peluang untuk mendorong pemulihan ekonomi Sudan. Namun, situasi Sudan dan pemerintahan transisinya yang rapuh berpotensi menghambat pemanfaatan peluang tersebut. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang berpotensi menguntungkan ekonomi, sebagian masyarakat masih memandang normalisasi sebagai langkah politik yang keliru. Hal ini terbukti dengan aksi protes yang dilakukan oleh ribuan orang di ibu kota Khartoum dan wilayah lain, menentang

kondisi ekonomi negara yang buruk dan keputusan normalisasi hubungan dengan Israel.¹³⁰

3.2.2 Kepentingan Sudan dalam Akses Informasi Intelijen

Sudan merupakan negara yang terletak di Timur Laut Afrika, berbatasan dengan beberapa negara seperti Mesir, Libya, Chad, dan Ethiopia. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, Sudan telah menghadapi konflik internal yang berkelanjutan, terutama yang melibatkan kelompok militan. Sejarah konflik di Sudan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor etnis, agama, dan politik. Salah satu konflik utama adalah perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang berakhir dengan pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Selain itu, daerah seperti Darfur telah mengalami kekerasan yang melibatkan kelompok militan dan pemerintah pusat.¹³¹

Perubahan pemerintahan yang sering terjadi dan pemerintahan yang lemah telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan kelompok teroris berkembang. Rezim Omar al-Bashir, yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun, sering kali menggunakan kelompok militan untuk mempertahankan kekuasaan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, menciptakan kondisi yang memungkinkan radikalisis. Banyak orang muda yang merasa tidak memiliki masa depan yang baik sering kali menjadi target rekrutmen kelompok teroris. Sudan ialah negara yang sangat beragam secara etnis dan agama.

¹³⁰ Michael Atit, *Proposed Sudan-Israel Peace Deal Triggers Protest in Khartoum*, Voa News, 2023, <https://www.voanews.com/a/proposed-sudan-israel-peace-deal-triggers-protest-in-khartoum/6950120.html>.

¹³¹ Huriye Yildirim Çınar and Adem Özer, *Internal and External Factors behind the Instability in Sudan*, XXVIII, no. 2 (2023): 93-173.

Ketegangan antara kelompok etnis dan agama yang berbeda sering kali dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memicu konflik dan mendapatkan dukungan.¹³²

Beberapa kelompok militan yang aktif di Sudan antara lain: Janjaweed, Kelompok militan yang terkenal dengan kekerasan di Darfur. Mereka diduga memiliki hubungan dengan pemerintah Sudan dan terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia. *Sudan People's Liberation Movement-North* (SPLM-N): Kelompok pemberontak yang aktif di wilayah Kordofan Selatan dan Blue Nile, menuntut hak-hak yang lebih besar bagi daerah mereka.¹³³

Dengan adanya Hubungan antara Sudan dan Israel telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak penggulingan Omar al-Bashir pada tahun 2019 dan pembentukan pemerintahan transisi di Sudan, negara ini mulai membuka diri terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Pada tahun 2020, Sudan secara resmi setuju untuk membuka hubungan dengan Israel sebagai bagian dari Abraham Accords yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, Sudan memiliki sejarah panjang ketegangan dengan Israel, terutama di bawah rezim Omar al-Bashir, yang mendukung kelompok-kelompok militan dan terorisme. Sudan juga dituduh sebagai tempat transit untuk senjata yang ditujukan untuk kelompok-kelompok seperti Hamas di Gaza. Hubungan ini mulai berubah setelah

¹³² Huriye Yildirim Çınar and Adem Özer, *Op.Cit*

¹³³ Dina Yulianti, Windy Dermawan, dan Muhammad Alfiandra Yudistira, *Analisis Kegagalan Consociational Approach Dalam Perjanjian Naivasha Sudan*, *Padjadjaran Journal of International Relations* 6, no. 1 (2024): 18, <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i1.40789>.

perubahan rezim di Sudan dan tekanan dari komunitas internasional untuk mengakhiri dukungan terhadap terorisme.¹³⁴

Pembukaan hubungan antara Sudan dan Israel ditandai dengan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2020, yang mencakup kerja sama ekonomi, diplomatik, dan keamanan. Salah satu aspek penting dari perjanjian ini adalah kerjasama di bidang intelijen untuk memerangi kelompok-kelompok militan yang mengancam keamanan kedua negara. Hal ini sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh Eli Cohen yang menjabat sebagai Menteri Intelijen bagi Israel yang mengunjungi Sudan, beliau mengatakan telah melakukan pertemuan yang cukup panjang dengan Presiden transisi Sudan Abdel Fattah Al-Burhan, dan menyatakan adanya dorongan perdamaian dengan Israel, karena hal ini adalah demi kepentingan rakyat Sudan, serta demi kepentingan ekonomi dan keamanan. Eli Cohen juga memahami bahwa kerjasama dengan Israel akan meningkatkan stabilitas di kawasan.

Intelijen yang dimiliki oleh Israel yang bernama Mossad yang merupakan intelijen terbaik yang dimiliki, akan mengajak bekerjasama dengan intelijen Sudan yang bernama *General Intelligence Service* (Sudan).¹³⁵ Israel menawarkan beberapa aspek kepentingan yang dapat digunakan Sudan untuk dapat membatasi ruang gerak kelompok militan ataupun terorisme yang tersebar di Sudan. Pertukaran informasi intelijen antara Sudan dan Israel adalah bagian penting dari

¹³⁴ United Against Nuclear Iran, *Iranian Infiltration of Africa*, (Amerika Serikat, 2024), <https://www.unitedagainstnucleariran.com/irans-relations-african-countries>.

¹³⁵ Eldad Ben Aharon, 'Profiles in Intelligence': An Interview with 8th Mossad Chief Danny Yatom, *Intelligence and National Security*, 2024, 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02684527.2024.2332030><https://doi.org/10.1080/02684527.2024.2332030>.

kerjasama ini. Melalui pertukaran ini, kedua negara dapat berbagi data tentang aktivitas kelompok militan, rute penyelundupan senjata, dan identifikasi jaringan teroris. Informasi ini sangat penting untuk mencegah serangan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.¹³⁶

Pelatihan dan Teknologi, Israel memiliki pengalaman dan teknologi canggih dalam bidang keamanan dan intelijen. Kerjasama ini memungkinkan Sudan untuk menerima pelatihan dalam taktik dan strategi anti-terorisme, serta memanfaatkan teknologi mutakhir seperti pemantauan elektronik dan analisis data. Teknologi ini dapat meningkatkan kapasitas Sudan dalam mendeteksi dan menindak kelompok militan. Operasi Bersama, Selain pertukaran informasi dan pelatihan, kerjasama ini juga mencakup kemungkinan operasi bersama untuk menargetkan kelompok militan. Operasi ini dapat berupa serangan langsung terhadap kamp militan atau penangkapan pemimpin kelompok teroris. Kolaborasi ini memungkinkan kedua negara untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing dalam operasi yang lebih efektif.

Dengan meningkatnya kapasitas Sudan untuk menangani kelompok militan, stabilitas regional juga diharapkan meningkat. Kerjasama ini mengurangi kemampuan kelompok militan untuk beroperasi di Sudan dan menggunakan negara ini sebagai basis untuk melancarkan serangan di kawasan tersebut. Kerjasama ini juga memperkuat hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel, serta membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut di bidang ekonomi dan pembangunan.

¹³⁶ Iahav Harkov, *Intelligence Minister Eli Cohen Goes the Sudanese Distance*, The Jerusalem Post, 2023, <https://www.jpost.com/israel-news/intelligence-minister-eli-cohen-goes-the-sudanese-distance-657799.v>

Pembukaan hubungan ini membawa Sudan lebih dekat dengan komunitas internasional dan membuka peluang investasi yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.

Eli Cohen juga mengatakan bahwasanya transformasi dari pendukung terorisme melawan Israel menjadi negara yang menjalin perdamaian dengan Israel hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi di Sudan dalam beberapa tahun terakhir. Diktator Omar al-Bashir digulingkan pada tahun 2019, dan sejak itu, Sudan berupaya melakukan transisi menuju demokrasi. Pada tahun 2020, Amerika menghapuskan sebutan negara sponsor teror di Sudan dengan dukungan bipartisan, sebuah langkah penting menuju rehabilitasi ekonomi dan kemitraan internasional. Beliau juga mengatakan bahwa hubungan dengan Sudan merupakan penting bagi Israel, hal ini sejalan dengan Sudan merupakan negara terbesar di Afrika memiliki lokasi yang strategis di tepi Laut Merah, Israel perlu melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara yang berpaling dari negara Iran.¹³⁷

Eli Cohen juga menilai Sudan membuat keputusan yang tepat yang harus dicapai oleh setiap negara yang berada di kawasan MENA, hal ini juga berkaitan dengan hindari pengaruh Iran dan kelompok militan yang ada. Hal ini berkaitan dengan dimana Iran masuk ke dalam sebuah wilayah, mereka berperilaku seperti hal yang dapat menghancurkan dengan memasukan pemahaman mengenai faktor ekstrimis Islam. Adanya perjanjian perdamaian terbaru yang terjalin antara Israel dan negara di Afrika dan Timur Tengah meningkatkan stabilitas regional.¹³⁸

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Sina Azodi, *Why Is Iran Concerned about the Peace Agreement between the UAE and Israel?*, Atlanticcouncil, 2020, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/why-is-iran-concerned-about-the-peace-agreement-between-the-uae-and-israel/>.

Cohen dan Burhan membahas kemungkinan Israel bergabung dengan aliansi Laut Merah yang baru, sebuah inisiatif dari Riyadh tahun lalu yang mencakup Arab Saudi, Yordania, Djibouti, Sudan, Somalia, Mesir, dan Yaman.¹³⁹ Israel hanya memiliki hubungan resmi dengan tiga negara tersebut, namun Cohen berargumentasi bahwa "demi kepentingan mereka kami bergabung. Kemampuan intelijen Israel akan memberikan kontribusi terhadap mereka, karena mereka perlu mempertahankan diri dari ekstremis Islam seperti yang kita lakukan, atau bahkan lebih. Kerjasama Sudan dengan Israel di bidang intelijen merupakan langkah strategis dalam memerangi kelompok militan dan terorisme. Pertukaran informasi, pelatihan, dan operasi bersama dapat meningkatkan kapasitas keamanan Sudan dan berkontribusi pada stabilitas regional.¹⁴⁰ Meskipun terdapat tantangan, manfaat kerjasama ini sangat signifikan untuk keamanan dan pembangunan Sudan di masa depan.

¹³⁹ Stephen Kalin, *Saudi Arabia Seeks New Political Bloc in Strategic Red Sea Region*, Reuters, 2018, <https://www.reuters.com/article/idUSKBN1OB1Z8/>.

¹⁴⁰ Samy Magdy, *Sudan's Top General Says Intelligence Sharing With Israel Helped Arrest Militants*, The Times Of Israel, 2022, <https://www.timesofisrael.com/sudans-top-general-says-intelligence-sharing-with-israel-helped-arrest-militants/>.